

SKRIPSI

**KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI TAKALAR, GOWA, MAROS,
PANGKEP DAN MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

ANNISA FILDZA SHAFFIRA

D521 16 306



**DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI TAKALAR, GOWA, MAROS,
PANGKEP DAN MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

ANNISA FILDZA SHAFFIRA

D521 16 306



**DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN (SKRIPSI)

**KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI TAKALAR, GOWA, MAROS,
PANGKEP DAN MAKASSAR**

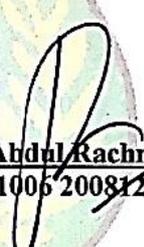
Disusun dan diajukan oleh

**ANNISA FILDZA SHAFFIRA
D52116306**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada tanggal 21 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,


Dr. Eng Ihsan, ST., MT.
NIP. 19710219 1999 03 1 002


Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST, Msi
NIP. 19741006 200812 1 002

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin




Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, S.T., M.Si.
NIP. 19741006 200812 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Annisa Fildza Shaffira

NIM : D521 16 306

Departemen : Perencanaan Wilayah dan Kota

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Ketimpangan Pembangunan di Takalar, Gowa, Maros, Pangkep dan Makassar

Bahwa: BENAR BEBAS DARI PLAGIARISME

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



Annisa Fildza Shaffira

KATA PENGANTAR

Bismillaah,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allaah ‘Azza wa Jalla yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“Ketimpangan Pembangunan di Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Makassar”** ini dapat penulis selesaikan pada waktu yang tepat. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

Latar belakang dipilihnya judul skripsi ini adalah karena penulis mengidentifikasi banyaknya ketimpangan pembangunan yang terjadi namun belum ada pembahasan lebih lanjut mengenainya. Berangkat dari latar belakang ini sehingga penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian ini dengan harapan hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan ke depannya terutama bagi para pembuat kebijakan dalam merealisasikan pembangunan yang berdasar pada pemerataan terutama di Kota Makassar.

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini tidak lain dikarenakan masih terbatasnya kemampuan penulis terutama dalam mendeskripsikan terkait dengan pokok pembahasan serta mengkorelasikan antara variabel-variabel yang menjadi inti permasalahan, sehingga saran dan kritik dari para pembaca merupakan sesuatu yang berharga bagi penulis untuk dapat memperbaiki penelitian ini kedepannya. Akhir kata, semoga Allaah ‘Azza wa Jalla senantiasa meridhoi segala usaha kita.

Makassar, 21 Oktober 2021



Annisa Fildza Shaffira

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR PETA.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Keadilan Spasial	6
2.2 Pembangunan Wilayah.....	8
2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Kota	9
2.4 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah	10
2.5 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Wilayah	13

2.6	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	16
	2.6.1 Pendekatan Produksi	17
	2.6.2 Pendekatan Pendapatan	17
	2.6.3 Pendekatan Pengeluaran.....	17
2.7	Infrastruktur.....	18
2.8	Penelitian Terdahulu	19
2.9	Alur Pikir Penelitian	19
 BAB III METODE PENELITIAN		24
3.1	Jenis Penelitian.....	24
3.2	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24
3.3	Jenis dan Kebutuhan Data	24
3.4	Teknik Pengumpulan Data	25
3.5	Variabel Penelitian	25
3.6	Teknik Analisis	26
3.7	Definisi Operasional.....	33
3.8	Kerangka Pikir Penelitian.....	34
 BAB IV GAMBARAN UMUM.....		36
	4.1.1 Kondisi Fisik	36
	4.1.2 Kependudukan.....	38
	4.1.3 Ketenagakerjaan	41
	4.1.4 Sumber Daya Manusia	43
	4.1.5 Sosial Budaya.....	44
	4.1.6 Ekonomi Wilayah.....	47
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		53
5.1	Analisis Ketersediaan Infrastruktur	53
5.2	Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi	65

5.2.1 Analisis Tipologi Klassen	67
5.3 Analisis Ketimpangan Wilayah	74
BAB VI PENUTUP	82
6.1 Kesimpulan.....	82
6.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	90
CURRICULUM VITAE.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1	Variabel Penelitian	26
Tabel 3.2	Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Daerah	28
Tabel 3.3	Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral	28
Tabel 4.1	Luas Wilayah Sulawesi Selatan	37
Tabel 4.2	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014-2018.....	39
Tabel 4.3	Tingkat Kepadatan Penduduk Tahun 2018	42
Tabel 4.4	Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Tahun 2018.....	43
Tabel 4.5	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Kelompok Umur Sekolah Tahun 2018.....	46
Tabel 4.6	Jumlah Fasilitas Kesehatan Wilayah Tahun 2018.....	46
Tabel 4.7	Jumlah Fasilitas Peribadatan Wilayah Tahun 2018	47
Tabel 4.8	PDRB Kabupaten/ Kota Wilayah Tahun 2018	49
Tabel 4.9	Kontribusi Sektoral Wilayah Tahun 2018.....	50
Tabel 5.1	Matriks Persebaran Fasilitas Wilayah Tahun 2018	54
Tabel 5.2	Matriks Distribusi Jumlah Penduduk Wilayah Tahun 2018	56
Tabel 5.3	Matriks Indeks Sentralitas Wilayah Tahun 2018	57
Tabel 5.4	Matriks Hierarki Persebaran Fasilitas Wilayah Tahun 2018	58
Tabel 5.5	Ordo Hierarki Pusat Pelayanan Indeks Sentralitas	60
Tabel 5.6	Hierarki Wilayah Berdasarkan Indeks Sentralitas	60

Tabel 5.7	Matriks Hasil Akhir Hierarki Persebaran Fasilitas Wilayah Tahun 2018	61
Tabel 5.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2014-2018	65
Tabel 5.9	Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral Wilayah Tahun 2014-2018	67
Tabel 5.10	Banyaknya Kabupaten/ Kota dengan Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral	68
Tabel 5.11	Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Perkapita Wilayah	70
Tabel 5.12	Tipologi Klassen Pendekatan Wilayah Tahun 2014-2018.....	70
Tabel 5.13	Kontribusi Sektor Terbesar pada Tiap Kabupaten/Kota	72
Tabel 5.14	Indeks Williamson Ketimpangan Wilayah Tahun 2014-2018.....	75
Tabel 5.15	Indeks Theil Between Wilayah Tahun 2014-2018.....	77
Tabel 5.16	Indeks Theil Within Wilayah Tahun 2014-2018.....	78
Tabel 5.17	Indeks Entropi Theil Wilayah Tahun 2014-2018.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pengaruh Spread Effect	11
Gambar 2.2	Pengaruh Backwash Effect.....	12
Gambar 2.3	Alur Pikir Penelitian	23
Gambar 3.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	35
Gambar 5.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2014-2018.....	66
Gambar 5.2	Indeks Ketimpangan Wilayah Tahun 2014-2018.....	75
Gambar 5.3	Indeks Ketimpangan Wilayah Tanpa Kota Makassar Tahun 2014-2018	76
Gambar 5.4	Indeks Theil Between Wilayah Tahun 2014-2018.....	78
Gambar 5.5	Indeks Theil Within Wilayah Tahun 2014-2018.....	79
Gambar 5.6	Indeks Entropi Theil Wilayah Tahun 2014-2018.....	80

DAFTAR PETA

Peta 4.1	Peta Batas Wilayah Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, Makassar .	38
Peta 4.2	Peta Kepadatan Penduduk Wilayah Tahun 2018	41
Peta 4.3	Peta Kontribusi PDRB Sektoral Wilayah Tahun 2018	52
Peta 5.1	Peta Hierarki Pusat Pelayanan Wilayah Metode Skalogram Tahun 2018.....	55
Peta 5.2	Peta Hierarki Pusat Pelayanan Wilayah Metode Indeks Sentralitas Marshall Tahun 2018	59
Peta 5.3	Peta Hasil Akhir Hierarki Pusat Pelayanan Wilayah Tahun 2018	62
Peta 5.4	Peta Visualisasi 3D Jumlah Fasilitas terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018	64
Peta 5.4	Peta Perkembangan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jumlah Fasilitas pada Tingkat Kecamatan tahun 2018	90
Lampiran 2	Nilai Indeks Williamson tahun 2014	94
Lampiran 3	Nilai Indeks Williamson tahun 2015	95
Lampiran 4	Nilai Indeks Williamson tahun 2016	96
Lampiran 5	Nilai Indeks Williamson tahun 2017	97
Lampiran 6	Nilai Indeks Williamson tahun 2018	98
Lampiran 7	Nilai Indeks Theil Entropi Within Kabupaten Takalar	99
Lampiran 8	Nilai Indeks Theil Entropi Within Kabupaten Gowa	101
Lampiran 9	Nilai Indeks Theil Entropi Within Kabupaten Maros	103
Lampiran 10	Nilai Indeks Theil Entropi Within Kabupaten Pangkep	105
Lampiran 10	Nilai Indeks Theil Entropi Within Kota Makassar	107

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN TAKALAR, GOWA, MAROS, PANGKEP DAN MAKASSAR

Annisa Fildza Shaffira¹⁾, Ihsan²⁾, Abdul Rachman Rasyid²⁾
Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: annisa.fildza@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan adalah suatu proses kontinu yang ditempuh untuk menghasilkan suatu perubahan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada sekarang. Ada banyak faktor yang dapat menghambat perkembangan pembangunan suatu wilayah, namun adanya perbedaan tingkat kualitas maupun kuantitas sumber daya dan daya dukung infrastruktur yang dimiliki merupakan salah satu penyebab utama terjadinya *gap* atau kesenjangan antar wilayah. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki laju pertumbuhan yang cukup pesat, namun perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut bagaimana tingkat ketimpangannya dan kabupaten di sekitarnya yaitu Takalar, Gowa, Maros, dan Pangkep. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Takalar, Gowa, Maros, Pangkep dan Makassar serta faktor yang mempengaruhinya. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Tipologi Klassen, Analisis Indeks Williamson, Analisis Entropi Theil, dan Analisis Skalogram. Menurut hasil perhitungan Indeks Williamson, selama periode perhitungan tahun 2014-2018 ditemukan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,66, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan Indeks Theil menunjukkan tingkat ketimpangan wilayah sebesar 1,40. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan yang terjadi cukup tinggi antar wilayah maupun di dalam wilayah, namun kontribusi terbesar dikarenakan ketimpangan antar wilayah. Berdasarkan Tipologi Klassen, struktur pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terbagi menjadi empat pola yaitu: perekonomian daerah yang maju dan tumbuh cepat terdiri dari Kota Makassar, daerah maju tertekan adalah Takalar, daerah potensial adalah Maros dan Pangkep, sedangkan daerah relatif tertinggal adalah Gowa. Persebaran fasilitas wilayah terbagi menjadi tiga ordo, namun hanya Makassar tergolong wilayah dengan ketersediaan fasilitas paling lengkap, sedangkan kabupaten lain memiliki tingkat ketersediaan yang tergolong minim. Adanya hasil ini mengindikasikan terjadinya ketimpangan yang cukup tinggi terjadi di Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Makassar.

Kata kunci: Ketimpangan, Pembangunan

¹⁾ Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas, Universitas Hasanuddin

²⁾ Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

DEVELOPMENT INEQUALITY IN TAKALAR, GOWA, MAROS, PANGKEP DAN MAKASSAR

**Annisa Fildza Shaffira¹⁾, Ihsan²⁾, Abdul Rachman Rasyid²⁾
Hasanuddin University, Indonesia**

Email: annisa.fildza@yahoo.com

ABSTRACT

Development is a continuous process taken to produce a change that is better than the current conditions. Many factors can hinder the development of a region. However, the difference in the quality and quantity of resources and carrying capacity of infrastructure owned is one of the leading causes of gaps between regions. Makassar City, as a growth center in South Sulawesi Province, has a relatively rapid growth rate. However, it is necessary to further review how the level of inequality and the surrounding districts are Takalar, Gowa, Maros, and Pangkep. This research is a type of descriptive research with a quantitative approach. This study aims to identify development inequalities in Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, and Makassar and the factors that affect them. The analytical methods used are Klassen Typology Analysis, Williamson Index Analysis, Theil Entropy Analysis, and Skalogram Analysis. According to the Williamson Index calculation results, during the calculation period in 2014-2018, a relatively high level of inequality of 0.66, while based on the calculation of the Theil Index showed a regional inequality rate of 1.40. This result indicates that the inequality is relatively high between regions and within the region, but the most significant contribution is inequality between regions. Based on the Klassen Typology, the economic growth structure of districts/ cities is divided into four patterns: the economy of the developed and fast-growing region consists of Makassar City. While the depressed developed area is in Takalar, the potential areas are Maros and Pangkep, while the relatively disadvantaged area is in Gowa. The distribution of regional facilities shows Makassar with the highest completeness. These results indicate that there is a fairly high inequality in Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, and Makassar.

Keywords: *Inequality, Development*

¹⁾ *Student of Urban Regional and Planning, Hasanuddin University*

²⁾ *Lecturer of Urban Regional and Planning, Hasanuddin University*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar termasuk percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000). Berdasarkan landasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat kebhinekaan yang tinggi, masih memiliki permasalahan ketimpangan pembangunan yang merupakan suatu tantangan terbesar dimana fokus pembangunan tertitik pada Indonesia bagian barat, sebagaimana dikatakan (Armida S. Alisjahbana, 2005). Pada tahun 2015, terdapat kesepakatan global yang terdiri dari 189 negara termasuk di dalamnya Indonesia yang bertekad untuk menghapuskan keterbelakangan dan mengurangi kesenjangan. Kesepakatan global ini melahirkan target atau tujuan-tujuan dalam bentuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang salah satunya meliputi tujuan ke-16 yaitu mengurangi ketimpangan di dalam maupun di luar negara.

Kesenjangan spasial dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara unit-unit spasial yang dapat dengan mudah dirasakan oleh penduduk suatu daerah. Misalnya, penduduk merasakan beberapa unit spasial memiliki fasilitas dan infrastruktur publik yang lengkap dan terjangkau sementara beberapa lainnya tidak (Kanbur dan Venables, 2005; Kim, 2008). Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan demografi pada tiap-tiap wilayah.

Salah satu dampak dari adanya persoalan ketimpangan wilayah ini adalah ditemuinya wilayah yang maju (*developed region*) dan wilayah yang relatif tertinggal (*underdeveloped region*) pada setiap kawasan. Fenomena ketimpangan

spasial sangat penting karena pertama, hal ini sangat mungkin disebabkan oleh kegagalan keadilan (Sugiri, 2009; Sugiri dan Nuraini, 2013). Jika hal ini terjadi, Sugiri (2009) mencatat bahwa kemiskinan dan ketidak-berkelanjutan dapat menjadi konsekuensinya.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota juga tidak terlepas dari fenomena ketimpangan pembangunan seperti yang dialami oleh wilayah-wilayah lainnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Filzah Wajdi (2011) yang menemukan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mengalami ketimpangan pembangunan dengan kecenderungan yang semakin meningkat, dimana pusat pembangunan wilayah berfokus pada 3 titik utama yaitu Kota Makassar, Parepare, dan Palopo.

Tercantum dalam dokumen RTRW bahwa titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan dalam bidang ekonomi, yang berarti sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi. Salah satu alat ukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan cerminan pendapatan regional.

Berdasarkan data PDRB yang dihimpun pada tahun 2018, Kota Makassar adalah penyumbang nilai PDRB terbesar dengan nilai yang signifikan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Perbedaan pendapatan per kapita yang tajam ini dapat menjadi indikasi terjadinya ketimpangan akibat konsentrasi aktivitas perekonomian yang bersifat sentral. Meski demikian, konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu tidak dapat dihindari dan bahkan cenderung dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan, sedangkan ketimpangan wilayah merupakan konsekuensi yang wajar asalkan masih dalam batas yang layak (Wajdi, 2011). Fenomena ketimpangan ini akan melahirkan daerah-daerah yang cenderung tertinggal, salah satunya adalah Kabupaten Pangkep yang pernah masuk dalam daftar kabupaten tertinggal.

Kota Makassar telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KSN Mamminasata sebagai zona perencanaan urban dan merupakan pusat pertumbuhan dan tujuan pergerakan. Penetapan ini menjadikan Kota Makassar sebagai pusat wilayah aglomerasi kegiatan ekonomi KSN Mamminasata (Bakri, 2016). Idealnya, sebagai pusat pertumbuhan, maka seharusnya Kota Makassar dapat memberikan dampak positif pada kabupaten yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, analisis kesenjangan antar wilayah menjadi penting untuk dilakukan untuk menilai keberhasilan pembangunan wilayah (Rangga, 2013). Keberadaannya

Berangkat dari latar belakang ini, maka perlu dilakukan tinjauan atas ketimpangan spasial yang terjadi di Kabupaten Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Kota Makassar dalam rangka meminimalisir ketidakadilan pembangunan yang terjadi.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian yang perlu untuk dijawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi ketersediaan infrastruktur pada Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Makassar?
2. Bagaimana pola dan karakteristik pertumbuhan ekonomi Takalar, Gowa, Maros, Pangkep dan Makassar?
3. Bagaimana tingkat ketimpangan wilayah di Takalar, Gowa, Maros, Pangkep dan Makassar?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah didapatkan, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat keadilan spasial di Kota Makassar dengan mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi. Tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Mengidentifikasi persebaran fasilitas yang ada di Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Makassar.

2. Mengetahui pola dan karakteristik pertumbuhan ekonomi di Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Makassar; dan
3. Mengidentifikasi ketimpangan wilayah yang terjadi di Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Makassar dan faktor penyebabnya;

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam skripsi ini antara lain:

1. Manfaat bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan wilayah maupun perumusan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan wilayah;
2. Manfaat bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang pentingnya keadilan spasial dalam pembangunan wilayah; dan
3. Manfaat bagi civitas akademik, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian terkait keadilan spasial.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Lokasi
Ruang lingkup lokasi skripsi ini sendiri dibatasi pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kota Makassar.
2. Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Identifikasi ketimpangan wilayah berdasarkan nilai PDRB; dan
 - b. Identifikasi distribusi infrastruktur pada tingkat kabupaten/kota.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi enam bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang pelaksanaan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika laporan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat berbagai hal menyangkut kajian kepustakaan berupa teori-teori, kajian literatur, kebijakan-kebijakan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan tentang metode-metode yang dilakukan dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data serta teknik pengumpulannya, variabel penelitian, teknik analisis yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian, dan definisi operasional yang terdapat di penelitian ini.

BAB IV Gambaran Umum, berisi kondisi eksisting umum lokasi studi yang dimulai dari cakupan yang paling luas yaitu pada Provinsi Sulawesi Selatan kemudian pada cakupan lebih sempit yaitu pada tiap kabupaten/kota yang menjadi fokus penelitian. Bab ini membahas diantaranya kondisi fisik, kependudukan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya, serta kondisi ekonomi di lokasi penelitian.

BAB V Hasil dan Pembahasan, berisi tentang hasil analisis dari data yang telah dilakukan serta pembahasan yang menjawab setiap pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis spasial.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran terkait dengan studi yang menjawab rumusan masalah yang ada berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keadilan Spasial

Ruang merupakan wadah yang mewakili keadaan spasial suatu wilayah, Lefebvre menyampaikan bagaimana ilmu pengetahuan lebih dominan dipergunakan dalam mendefinisikan arti ruang sendiri, namun kerap kali abai dalam menganalisa dualitas konstitutifnya sehingga proses generatif yang terjadi dan segala disfunksinya tidak mampu menggambarkan secara komprehensif (Lefebvre, 1991; dalam Hexagraha, 2019). Dalam arti luas, keadilan spasial (*spatial justice*) mengacu pada fokus penekanan aspek sosial dan spasial dari segi keadilan dan ketidakadilan.

Keadilan sendiri merupakan suatu hal yang berbentuk abstrak untuk didefinisikan, namun pondasi dari keadilan spasial sendiri melibatkan distribusi yang adil dan merata pada aspek keruangan baik untuk sumber daya maupun peluang yang tercipta. Terciptanya distribusi yang adil dan merata akan menghasilkan penyetaraan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyetaraan dihadirkan dengan harapan terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkotaan yang merata. Ukuran kesejahteraan masyarakat sendiri merupakan ukuran yang relatif dan sukar untuk didefinisikan, dikarenakan ia dibentuk oleh berbagai faktor yang kait mengait yang dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam membentuk suatu sistem.

Upaya pembangunan masyarakat baik itu di desa, kota, maupun daerah, pemerintah dan masyarakat itu sendiri dihadapkan pada berbagai keterbatasan yang mengurangi kebebasan gerak usaha pencapaian tujuan. Bersamaan dengan segala keterbatasan itu, terkandung hasrat mencapai hasil sebesar-besarnya untuk memenuhi segala kebutuhan sebagai ukuran kesejahteraan. Kedua hal yang saling bertolak belakang ini, di satu sisi ada keinginan untuk mencapai hasil yang maksimal sedang di sisi lain terdapat keterbatasan, maka perlunya disusun strategi atau rencana agar usaha pencapaian tujuan dapat optimal dan berjalan dengan efisien.

Keadilan spasial bukanlah pengganti maupun metode alternatif dari isu sosial, ekonomi, atau bentuk keadilan lainnya, melainkan sebuah cara untuk memandang keadilan dari perspektif ruang yang lebih kritis. Berdasarkan sudut pandang ini akan selalu terdapat dimensi spasial yang relevan dengan keadilan sementara pada saat yang sama semua aspek geografis juga memiliki ekspresi keadilan dan ketidakadilan terbangun di dalamnya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward Soja ini, keadilan spasial dibagi menjadi dua yaitu *distributional justice* dan juga *procedural justice*. Keadilan distributif ini diartikan sebagai alokasi sumberdaya yang merata bagi seluruh masyarakat perkotaan. Namun dalam pemahaman lebih lanjut, keadilan ini membolehkan terjadinya penyimpangan, selama tingkat ketimpangan yang ada diperhatikan secara seksama dan dalam batas yang wajar. Lebih lanjut, Sugiri (2009) membuat sebuah konsep pembangunan wilayah berbasis keadilan (EBRD) yang menegaskan empat fungsi yang harus terjadi aplikasi keadilannya, yaitu fungsi distribusi manfaat, fungsi produksi, fungsi non-produksi (seperti ekologis, lindung, dan penyangga), dan reinvestasi untuk keberlanjutan. Model ini juga bersesuaian dengan literatur terkait keadilan (Ituarte-Lima, et al. 2014; McDermott et al., 2013) yang mengelompokkan keadilan menjadi keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan kontekstual.

Menemukan contoh-contoh ketidakadilan spasial tergolong relatif mudah, dimana kesenjangan dan ketimpangan pembangunan terjadi baik dari skala regional sampai skala permukiman, tetapi untuk mengidentifikasi dan memahami penyebab yang mendasari terjadinya ketidakadilan spasial maka diperlukan telaah lebih jauh mengenai hal ini. Diskriminasi lokasi lahir dari bias yang terdapat pada populasi tertentu dikarenakan lokasi geografisnya yang justru bersifat fundamental dalam mengusung keadilan spasial yang berkelanjutan.

Keadilan spasial dapat digunakan sebagai suatu metode untuk melihat dan menganalisis, dan menguji keputusan perkotaan serta dampak yang akan muncul pada ruang perkotaan tersebut (Soja, 2010). *Spatial justice* adalah sebuah gagasan bahwa keadilan, bagaimanapun ia didefinisikan, memiliki konsekuensi geografis, dimana ekspresi spasial itu sendiri lebih daripada sebuah refleksi dari latar belakang

yang ada ataupun sekumpulan atribut fisik untuk dipetakan. Keadilan spasial dapat digunakan sebagai suatu metode untuk melihat dan menganalisis, dan menguji keputusan perkotaan serta dampak yang akan muncul pada ruang perkotaan tersebut (Soja, 2010).

2.2 Pembangunan Wilayah

Hakikat pembangunan pada dasarnya adalah membangun insani (manusia). Todaro (2000) berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya serangkaian perubahan besar-besaran terhadap struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional.

Berlandaskan pemahaman UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan dirumuskan sebagai Pembangunan Nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional.

Berdasarkan pendapat lain dari Goulet yang dikutip dalam Todaro (2000), pembangunan lebih mengarah kepada perubahan yang menyeluruh yang meliputi usaha penyesuaian keseluruhan sistem sosial terhadap kebutuhan dasar dan keinginan-keinginan yang berbeda dan berlainan bagi setiap pribadi dan kelompok sosial dalam sistem tersebut. Lebih lanjut Keats (2004) berpendapat bahwa sebagian besar dimensi pembangunan dilaksanakan sebagai suatu peningkatan gaya hidup masyarakat dengan meningkatkan pendidikan, pendapatan, pengembangan keterampilan, dan ketenagakerjaan.

Meski terdapat banyak perbedaan pendapat diantara para ahli tentang definisi pembangunan, namun secara umum telah disepakati bahwa pembangunan adalah sebuah proses yang ditempuh untuk menghasilkan suatu perubahan. Pembangunan wilayah adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan pada wilayah baik secara fisik maupun non-fisik menuju lebih baik dari kondisi yang ada sekarang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Telah dicantumkan dalam dokumen RTRW sendiri bahwa titik berat dalam pembangunan jangka panjang wilayah adalah pembangunan dalam bidang ekonomi, yang artinya sebagian dari usaha pembangunan diarahkan pada pembangunan ekonomi, sedangkan untuk pembangunan bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi pembangunan ekonomi. (Murry, 2000) berpendapat bahwa pembangunan wilayah yang berimbang adalah terpenuhinya potensi pembangunan di setiap wilayah dengan kapasitas pembangunannya masing-masing.

2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Kota

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian dalam suatu wilayah yang dalam prosesnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor yang bersifat primer ke sektor sekunder serta tersier. Berlandaskan dari hal ini, maka arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin (BPS, 2018).

Lebih lanjut (Irawan, 2014) mencantumkan bahwa bentuk perkembangan ekonomi sebagian besar bergantung pada pemecahan beberapa masalah pokok. Masalah-masalah pokok ini antara lain adalah; akumulasi kapital atau terjadinya kapitalisme, dan penggunaan maksimal dari sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menaikkan serta memperbaiki produksi barang dan jasa. Lebih lanjut mengenai ekonomi wilayah, (Seers, 1973) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi yang ideal terjadi apabila tiga sasaran utama tercapai yaitu peningkatan pendapatan per kapita, penurunan ketimpangan dan pengurangan kemiskinan. Dengan kata lain,

pembangunan harus dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat dalam arti luas baik secara ekonomi maupun secara sosial (Todaro dan Smith, 2003).

2.4 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan suatu aspek yang umum terjadi dalam sebuah proses pembangunan wilayah. Pengertian dari ketimpangan pembangunan adalah adanya perbedaan dalam pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya (Williamson, 1965). Ketimpangan pembangunan antar wilayah menurut (Sjafrizal, 2012) merupakan sebuah fenomena yang umum terjadi dalam proses pembangunan suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan demografi pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah relatif tertinggal (*underdeveloped region*).

Mubyarto (1995) dalam Fitrah Saei (2018) membedakan ketimpangan menjadi 3, yaitu:

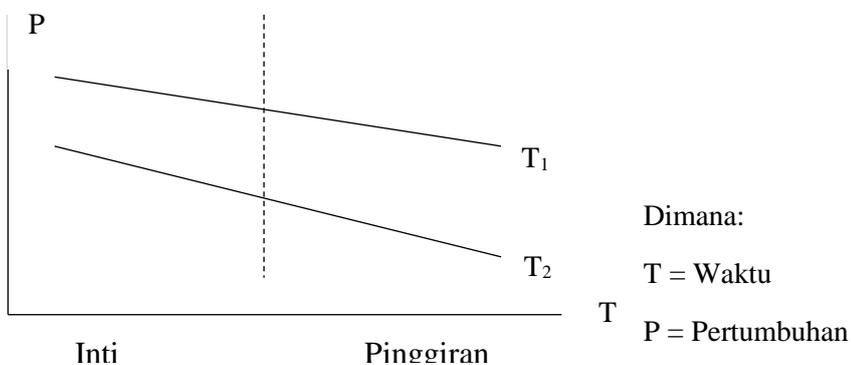
1. Ketimpangan antar sektor, yaitu seperti antar sektor industri dan sektor pertanian.
2. Ketimpangan antar daerah, dimana ketimpangan ini dapat terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki.
3. Ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan jenis ini merupakan jenis yang paling berat dan sangat mungkin terjadi di dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal ataupun kapitalis.

Indikasi ketimpangan pembangunan ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Menurut Kuncoro (2006), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat, sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan

daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan sebuah *gap* atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Myrdal (1967) menyebutkan, perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan dapat menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) yang mana akan mendominasi pengaruh yang lebih menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan suatu daerah, yang mana akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat dan bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Kuncoro, 2003). Lebih lanjut, Hagget (1979) menjabarkan dalam bentuk visual yang dapat menambah pemahaman mengenai teori efek ini.

Jika pertumbuhan wilayah memiliki dampak atau pengaruh positif, dimana perkembangan yang terjadi di wilayah tersebut memberi dampak menguntungkan bagi wilayah disekitarnya, maka proses pertumbuhan ekonomi di wilayah ini disebut dengan *Spread Effects*. Pengaruh *Spread Effects* tersebut dapat ditinjau pada Gambar 2.2 berikut ini:



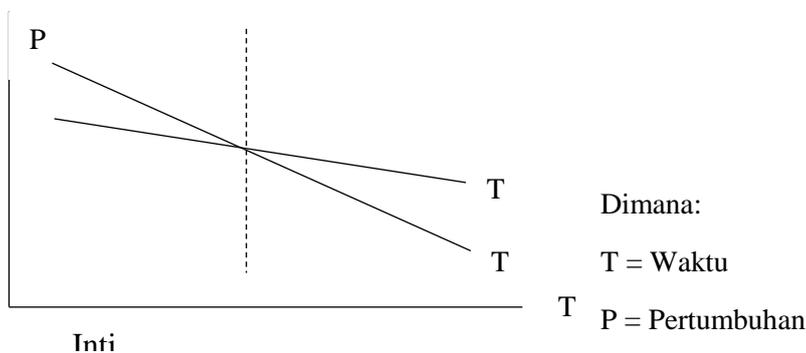
Gambar 2.1 Pengaruh Spread Effect

Sumber: Hugget (1979)

Seperti pada Gambar 2.1, garis pertumbuhan yang terjadi pada T₁ akan memberi pengaruh pada T₂ yang akan turut mengikuti laju perkembangan yang berlangsung pada T₁. Jika pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dominan pada *spread effects* maka wilayah tersebut memiliki kecenderungan ke arah pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah. Salah satu contoh dari efek ini adalah keadaan dimana suatu kota

akan mendorong pergerakan pertumbuhan kabupaten disekitarnya, terutama apabila didukung oleh ketersediaan sarana transportasi yang mendukung pembangunan sebuah kutub pertumbuhan yang baru.

Sedang pada kebalikannya, apabila pertumbuhan pada suatu wilayah memberi dampak ataupun pengaruh negatif pada wilayah sekitarnya, dimana keuntungan yang dirasakan hanya pada wilayahnya sendiri, maka proses pertumbuhan ekonomi di wilayah ini disebut dengan *Backwash Effect*. Diagram *backwash effect* dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Pengaruh Backwash Effect
Sumber: Hugget (1979)

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.3, perubahan garis pertumbuhan pada T_1 menuju T_2 pada suatu wilayah pusat menghasilkan dampak positif hanya pada wilayahnya sendiri saja, sedangkan dampak yang diterima pada wilayah pinggiran justru bertolak belakang. Disisi lain, pertumbuhan pesat pada suatu kawasan inti yang membawa keuntungan bagi wilayahnya, justru membawa dampak negatif yang merugikan bagi wilayah di sekitarnya. Apabila efek ini menjadi dominan pada suatu wilayah maka kecenderungan menuju kearah ketimpangan. Salah satu contoh dari terjadinya efek ini adalah perkembangan pesat pada suatu kota akan memberi tarikan yang besar untuk tenaga kerja, menghasilkan lahirnya permukiman-permukiman baru sedangkan kawasan di sekitarnya akan menjadi lambat berkembang.

Teori permasalahan ketimpangan antar wilayah awalnya dikemukakan oleh North dalam analisisnya yang berjudul Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Teori ini

memunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antar tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih lanjut dikenal dengan Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012).

Menurut Sjafrizal (2012) dalam Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terus menerus meningkat sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncaknya. Setelah itu, apabila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah ini akan perlahan surut. Berdasarkan hipotesa ini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini akan lebih mudah ditemukan dalam tingkat tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah.

Berdasarkan teori ini, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah menyerupai huruf u terbalik. Teori ini juga turut didukung oleh Simon Kuznet (1955) yang mengklaim bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan relatif memburuk, namun pada selanjutnya distribusi pendapatan cenderung membaik. Teori observasi ini kemudian dikenal dengan Kurva Kuznet “U-Terbalik”.

2.5 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan teori (Williamson, 1965) dalam (Lutfi Muta'ali, 2015) menyebutkan bahwa ketimpangan wilayah akan selalu ditemukan pada tahap awal pembangunan, yang kemudian kian lama kian membesar dan terjadinya konsentrasi pembangunan di daerah-daerah tertentu saja. Namun pada tahap yang lebih matang, apabila dilihat dari pertumbuhan ekonominya maka akan terjadi keseimbangan antar daerah serta berkurangnya ketimpangan secara signifikan.

Beberapa penyebab terjadinya ketimpangan wilayah diantaranya adalah migrasi tenaga kerja oleh kalangan terdidik yang masuk wilayah maju, migrasi kapital antar daerah yang tidak seimbang, aglomerasi perkotaan, pengembangan infrastruktur yang bias kota, serta kurangnya keterkaitan antar daerah yang menyebabkan

terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak pada semakin besarnya kesenjangan yang terjadi (Williamson, 1965). Sedangkan dengan berdasar teori oleh (Syafrizal, 2012) di Indonesia faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah adalah 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa.

Menurut (Rustiadi dkk, 2007) ada beberapa penyebab utama terjadinya disparitas, antara lain:

1. Faktor Geografis

Apabila suatu wilayah sangat luas, maka distribusi dari sumber daya nasional, sumber energi, sumber daya pertanian, topografi, iklim hingga curah hujan jadi tidak akan merata. Apabila faktor-faktor yang lainnya sama, maka kondisi geografi yang lebih baik akan menghasilkan perkembangan suatu wilayah yang lebih baik lagi.

2. Faktor Historis

Perkembangan masyarakat dalam suatu wilayah tergantung dari kegiatan ataupun budaya hidup yang telah dilakukan di masa lalu. Bentuk organisasi dan kehidupan perekonomian pada masa lalu merupakan faktor penyebab yang cukup penting terutama yang terkait dengan sistem intensif terhadap kapasitas kerja dan *entrepreneurship*.

3. Faktor Politis

Ketidakstabilan suhu politik memiliki pengaruh besar dalam perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik juga akan menyebabkan orang untuk ragu dalam upaya investasi sehingga kegiatan ekonomi pada suatu wilayah tidak akan berkembang dengan baik. Bahkan dapat terjadi pelarian modal ke luar wilayah, untuk investasi kepada wilayah yang kondisi politiknya lebih stabil.

4. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik atau terpusat yang terjadi hampir di semua sektor, menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan wilayah.

Kebijakan ini umumnya lebih menekankan pertumbuhan dan pembangunan pusat-pusat pembangunan di wilayah tertentu seperti pada pusat kota dengan tarikan yang lebih kuat sehingga dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah yang besar.

5. Faktor Administratif

Ketimpangan wilayah dapat pula terjadi dikarenakan kemampuan pengelolaan bidang administrasi. Wilayah yang dikelola dengan administrasi yang baik cenderung tumbuh lebih maju dibandingkan dengan yang tidak. Hal inilah yang mendasari pentingnya kehadiran administrator yang jujur, terpelajar, dan terlatih dengan sistem administrasi yang efisien.

6. Faktor Sosial

Masyarakat memiliki norma dan budaya yang telah dianut dalam jangka waktu lama, dengan bentuk kepercayaan-kepercayaan primitif, kepercayaan tradisional, dan nilai-nilai sosial yang cenderung konservatif dapat menjadi alasan penghambat perkembangan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat dengan pola pikir atau kepercayaan yang relatif maju umumnya memiliki institusi dan perilaku yang cenderung kondusif untuk berkembang. Perbedaan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan wilayah.

7. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antara lain:

- a. Faktor ekonomi yang berkaitan dengan perbedaan kualitas dan kuantitas dari berbagai faktor produksi yang ada seperti: lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi, dan juga perusahaan;
- b. Faktor ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi berbagai faktor. Salah satunya adalah lingkaran kemiskinan, yang melahirkan kondisi masyarakat yang tertinggal, standar hidup dan konsumsi yang rendah, tabungan rendah, investasi rendah dan juga tingkat pengangguran meningkat. Pada wilayah yang maju, pendapatan hingga standar hidup semakin meningkat, tabungan semakin banyak yang pada akhirnya menghasilkan masyarakat yang lebih maju;

- c. Faktor ekonomi yang berhubungan dengan pasar bebas juga pengaruhnya terhadap *spread effect* dan *backwash effect*. Kekuatan pasar ini telah mengakibatkan faktor-faktor ekonomi seperti tenaga kerja, modal, perusahaan dan aktivitas ekonomi seperti industri, perdagangan, perbankan, dan asuransi yang dalam ekonomi maju memberi hasil yang lebih besar dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang lebih maju; dan
- d. Faktor ekonomi yang terkait dengan distorsi pasar, kebijakan harga, keterbatasan spesialisasi, keterbatasan keterampilan tenaga kerja yang ada dan sebagainya.

Pembangunan yang seimbang menurut Murty (2000) berimplikasi pada suatu pertumbuhan yang adil dan merata dari wilayah yang berbeda menurut luasnya, keperluan maupun kemampuan pembangunannya masing-masing. Namun bukan artinya bahwa setiap wilayah harus memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, bukan juga berarti tingkat industrialisasi ataupun pola perekonomian yang seragam antar wilayah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kapasitas pembangunan yang baik berdasarkan potensi daerah sehingga keuntungan dari pertumbuhan ekonominya dapat dinikmati oleh penduduk seluruh wilayah.

2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu tolak ukur kinerja pembangunan suatu wilayah khususnya pada bidang ekonomi dalam rentang waktu periode tertentu. PDRB merupakan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu kawasan yang timbul akibat berbagai macam aktivitas ekonomi. Data PDRB tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi wilayah yang sedang terjadi di suatu wilayah, tetapi juga dapat menggambarkan perekonomian yang terjadi di masa lalu dan juga kemungkinan-kemungkinan prediksi perekonomian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

Berdasarkan teori ekonomi sendiri, perhitungan PDRB sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan tiga jenis metode pendekatan yang meliputi pendekatan dari segi produksi (*production approach*), pendekatan dari segi pendapatan (*income approach*), pendekatan dari segi pengeluaran (*expenditure approach*) yang dapat

disajikan berdasarkan dua jenis yaitu dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku dalam rentang waktu periode perhitungan dengan tujuan melihat struktur perekonomian, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun basis/ dasar dengan tujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa PDRB merupakan sebuah indikator yang dapat mengatur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai bahan utama perencanaan dan pengambilan keputusan.

2.6.1 Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan ini umumnya juga disebut dengan pendekatan nilai tambah, karena pendekatan ini dilakukan dengan menjumlahkan Nilai Tambah Bruto (*Gross Value Added*) yang dapat diperoleh dari jumlah nilai output dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*).

2.6.2 Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Menurut metode pendekatan ini, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam kurun jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah berupa upah dan jadi, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan diluar potongan pajak penghasilan maupun pajak lainnya. Berdasarkan definisi ini, maka PDRB juga mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jumlah dari seluruh komponen pendapatan per sektor inilah yang disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral.

2.6.3 Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan PDRB dengan cara ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan masyarakat. PDRB menurut pendekatan ini adalah semua komponen pengeluaran akhir seperti: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto dalam jangka

waktu tertentu. Secara konsep ketiga pendekatan ini memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya.

2.7 Infrastruktur

Infrastruktur adalah roda penggerak pembangunan di suatu wilayah. Dari aspek ekonomi regional, mulai dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dianggap sebagai kereta penggerak pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur juga memiliki peran penting terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, diantaranya adalah peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses terhadap lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu suatu keberlanjutan yang fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja (Harris, 2017).

Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial (Setiadi, 2006). Ada banyak peran infrastruktur yang telah disoroti oleh berbagai ahli.

World Bank (1994) membagi infrastruktur atas tiga bagian yaitu: 1) Infrastruktur ekonomi merupakan pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi: public utilities (tenaga listrik, telkom, air, sanitasi, gas), pekerjaan umum atau public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase), dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya); 2) Infrastruktur sosial merupakan infrastruktur yang mengarah pada pembangunan manusia dan lingkungannya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi; dan 3) Infrastruktur administrasi merupakan infrastruktur dalam bentuk penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Maka secara umum, infrastruktur dapat didefinisikan sebagai sistem fisik sarana prasarana dalam bentuk transportasi, pengairan, drainase, hingga bangunan-

bangunan dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan berkehidupan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terkait Ketimpangan Spasial ini, peneliti melakukan studi pustaka dengan menggunakan kajian-kajian terkait dengan penelitian seperti buku referensi maupun jurnal-jurnal terlebih dahulu dengan tujuan untuk memperluas sudut pandang terdapat metode maupun variasi yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan.

Melalui studi literatur ini penulis dapat menemukan beberapa variabel yang berkesinambungan dan sejalan dengan alur analisis dalam penelitian ini. Studi terdahulu yang dicantumkan dipilih berdasarkan kesamaan penelitian maupun alur penelitian mengenai ketimpangan wilayah. Penelitian-penelitian yang digunakan penulis sebagai bahan referensi dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2.9 Alur Pikir Penelitian

Pelaksanaan pembangunan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang mempengaruhinya adalah pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, ketimpangan antar wilayah atau antar sektor, dan juga persebaran fasilitas yang merata. Alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis/Tahun	Variabel	Teknik Analisis	Output Penelitian
1.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten di Provinsi Bali	Ida Ayu Indah Utami Dewi, dkk/2019	PDRB PDRB perkapita Kependudukan Laju pertumbuhan ekonomi	Analisis Tipologi Klassen, Analisis Indeks Williamson, Regresi Non-Linier	Struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terbagi dalam tiga pola yaitu: perekonomian daerah yang maju dan tumbuh cepat, terdiri dari Kabupaten Badung, daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng; daerah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Klungkung; dan daerah tertinggal yaitu Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem. Indeks Williamson di Provinsi Bali berkisar pada nilai 0,68 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Bali tinggi. Hipotesis Kuznets tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan berbentuk kurva U terbalik tidak berlaku di Provinsi Bali.
2.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Filzah Wajdi/2011	PDRB PDRB perkapita PDRB sektoral Kependudukan Ketenagakerjaan APBD Interaksi antarwilayah	Analisis Indeks Williamson, Analisis Indeks Theil, Analisis skalogram, Analisis regresi linier berganda, Analisis interaksi spasial	<ul style="list-style-type: none"> Telah terjadi disparitas pembangunan. Penyebab utamanya adalah disparitas antar-wilayah pada tiap-tiap sektor yang terjadi di dalam Kabupaten/Kota. Perkembangan aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan juga belum maksimal dan perkembangan tiap sektor cenderung kurang merata. Sektor pertanian adalah sektor yang paling merata persebarannya dibandingkan dengan sektor lainnya. Ditinjau dari struktur keuangan daerah, ketimpangan juga dapat bersumber dari belanja realisasi APBD yang dilakukan oleh pemprov Sulawesi Selatan dimana realisasi belanja bidang terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan belanja infrastruktur adalah sumber utama terjadinya disparitas.

No.	Judul	Penulis/Tahun	Variabel	Teknik Analisis	Output Penelitian
					<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan juga terjadi dari analisis pusat pelayanan dimana terdapat perbedaan ketersediaan infrastruktur antar kota dan kabupaten yang ada. • Untuk meningkatkan interaksi antar kabupaten/kota secara umum adalah dengan mengoptimalkan peningkatan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sosial, bukan hanya pada peningkatan infrastruktur ekonomi saja.
3.	Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Makassar, Maros, Gowa dan Takalar	Reza Fauzi Bakri, dkk/2016	PDRB Kependudukan Laju pertumbuhan ekonomi	Analisis Tipologi Klassen, Analisis Indeks Williamson, Analisis Skalogram	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat perkembangan wilayah paling maju adalah di wilayah Kota Makassar, dan wilayah relatif tertinggal adalah di wilayah Kabupaten Takalar dan perbedaan hierarki pusat-pusat kegiatan penduduk, kegiatan ekonomi utama, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan perkapita berimplikasi terhadap disparitas pembangunan antar wilayah Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar. • Tingkat disparitas dari wilayah Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar tergolong tinggi dengan nilai indeks 0,75 pada tahun 2015.
4.	Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007	Cholif Prasetyo Wicaksono/2010	PDRB PDRB per kapita Laju pertumbuhan ekonomi Jumlah penduduk Struktur ekonomi Disparitas Pendapatan Daerah	Analisis pertumbuhan ekonomi, Analisis Location Quotient (LQ), Shift share, Tipologi Klassen, Indeks Williamson dan Indeks Theil	Sektor industri pengolahan dan sektor pertanian termasuk sektor yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. Masih banyak daerah di Provinsi Jawa Tengah yang tergolong dalam daerah relatif tertinggal, tercatat sebanyak 14 kabupaten termasuk daerah relatif tertinggal. Disparitas pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2007 tergolong tinggi ($> 0,5$) dan mengalami kecenderungan menurun. Sementara hipotesis "U" terbalik Kuznets yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan dengan ketimpangan tidak berlaku di Provinsi Jawa Tengah.

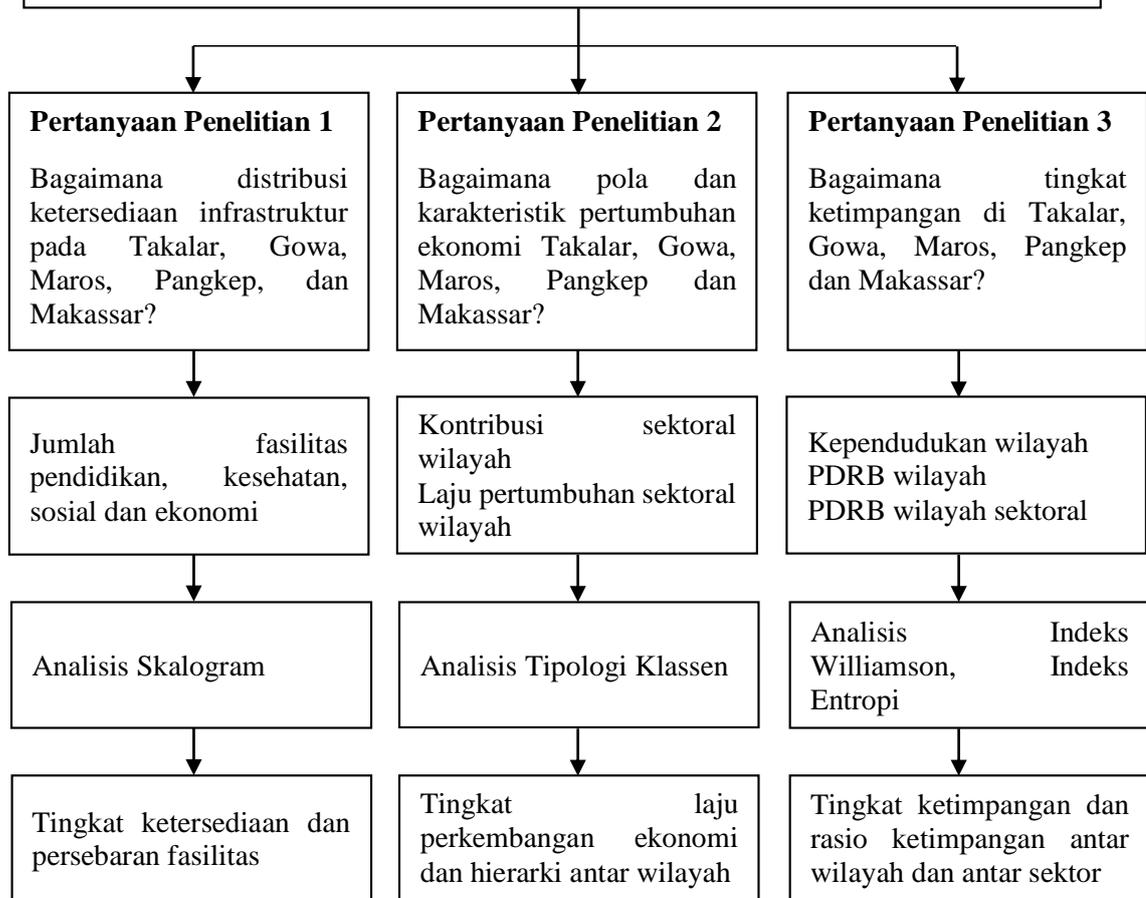
No.	Judul	Penulis/Tahun	Variabel	Teknik Analisis	Output Penelitian
5.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kecamatan di Kota Ambon	Jefri Tipka/2014	Ketimpangan Pembangunan, PDRB, Kurva U-Terbalik	Analisis Tipologi Klassen, Analisis Indeks Williamson, Korelasi Pearson	<p>Dari hasil tipologi klassen Kota Ambon dapat dibagi menjadi dua klasifikasi. Daerah yang pertama yakni daerah maju dan tumbuh cepat terdiri dari dua kecamatan yakni Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Teluk Ambon. Daerah yang kedua yakni daerah relatif tertinggal adalah Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan.</p> <p>2. Selama periode pengamatan tahun 2007-2010 angka ketimpangan dihitung dengan Indeks Williamson angkanya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dikatakan ketimpangan pembangunan di Kota Ambon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hipotesis Kuznets tentang kurva U-terbalik di Kota Ambon tidak berlaku pada periode penelitian (2003-2010).</p>

Sumber: Dewi, dkk, 2019; Wajdi, 2011; Bakri, dkk, 2016; Wicaksono, 2010; Tipka, 2014; Hasil dirangkum, 2020

Analisis Ketimpangan Pembangunan Spasial

Latar Belakang

Perbedaan kandungan atau sumber daya pada suatu wilayah akan menyebabkan perkembangan tiap-tiap wilayah juga berbeda, hal ini juga yang dialami di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kota Makassar sebagai ibukotanya. Namun, maraknya sentralisasi pembangunan pada Kota Makassar justru akan menghasilkan ketimpangan yang semakin melebar kian waktu, terutama pada kabupaten disekitarnya yaitu Takalar, Gowa, Maros dan Pangkep.



Identifikasi ketimpangan spasial yang terjadi di Takalar, Gowa, Maros, Pangkep dan Makassar

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan ataupun masukan bagi pemerintah provinsi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan wilayah maupun perumusan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan wilayah

Gambar 2.3 Alur Pikir Penelitian

Sumber: Hasil analisis, 2020